

# EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 (STUDI KASUS: KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA)

## ABSTRAK

Tanggung jawab besar yang diemban oleh Ditjen Polpum Kemendagri RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dalam negeri, maka muncul sejumlah langkah transformasi digital yang diterapkan oleh Ditjen Kemendagri RI dalam memenuhi pelayanan publik menyeluruh ke setiap daerah di Indonesia. Beberapa aplikasi yang diluncurkan oleh Kemendagri RI masih memiliki kendala, baik dari infrastruktur yang kurang memadai di daerah tertentu dengan baik hingga fitur dari aplikasi tidak berfungsi dengan baik. Adapun permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan proses bisnis dari tata kelola teknologi tidak dapat berjalan dengan optimal, diantaranya permasalahan infrastruktur yang belum memadai, SOP yang belum tetap, dan keterbatasan pengajuan dana serta proses bisnis yang belum terimplementasi dengan prosedur yang tepat. Sehingga perlu dilakukan pengukuran dan perbaikan berdasarkan permasalahan yang ditemukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI yang dimiliki dalam mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah satu *Framework* yang dapat diimplementasikan untuk standar evaluasi/audit adalah COBIT 2019 yang dilengkapi dengan *Design Faktor Toolkit*, sehingga memudahkan organisasi dalam menggambarkan permasalahan yang ditemukan dan perlu dilakukan perbaikan. Dari evaluasi yang dilakukan dihasilkan perhitungan *capability* dan *maturity* pada proses EDM02, APO03, APO04, dan DSS01 berada pada level 4 (*Quantitative*) dan proses BAI06 berada pada level 3 (*Defined*). Dari perhitungan yang diperoleh, tata kelola teknologi informasi pada Ditjen Polpum Kemendagri RI sudah berjalan mengikuti kebutuhan proses bisnis perusahaan, namun perlu perbaikan lebih lanjut terhadap beberapa aspek yang mendukung perancangan tata kelola teknologi informasi Ditjen Polpum dan perlu memperhatikan komponen, infrastruktur, prosedur hingga mitigasi bencana layanan teknologi informasi.

**Kata kunci:** COBIT 2019, Evaluasi, Tata Kelola

**EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE USING COBIT  
2019 FRAMEWORK (CASE STUDY: KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA)**

**ABSTRACT**

*The large responsibility carried out by Ditjen Polpum Kemendagri RI carrying out duties and functions in domestic government has resulted in a number of digital transformation steps being implemented Ditjen Polpum Kemendagri RI to provide comprehensive public services to every region in Indonesia. Several applications launched by Ditjen Polpum Kemendagri RI still have problems, ranging from inadequate infrastructure in certain areas to application features not functioning properly. There are other problems that cause technology management business processes to not run optimally, including inadequate infrastructure, incomplete SOPs, limited funding applications and business processes that have not been implemented using appropriate procedures. So it is necessary to measure and improve based on the problems found to optimize the use of existing IT to support ongoing business processes. One framework that can be implemented for evaluation/audit standards is COBIT 2019 which is equipped with a Design Factor Toolkit, making it easier for organizations to describe the problems found and the need for improvement. From the evaluation carried out, the capability and maturity calculations for the EDM02, APO03, APO04, and DSS01 processes were at level 4 (Quantitative) and the BAI06 process was at level 3 (Defined). From the calculations obtained, information technology governance at Ditjen Polpum Kemendagri RI is already running according to the needs of the company's business processes, but needs further improvements to several aspects that support the design of information technology governance of Ditjen Polpum to pay attention to components, infrastructure, procedures and disaster mitigation. information technology services.*

**Keywords:** COBIT 2019, Evaluation, Governance